

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada tahun 2009 negara Indonesia melaksanakan pemilu yang ke-10 kalinya, yaitu pemilu legislatif, presiden dan wakil presiden yang didasari dengan banyaknya partai politik yang maju dalam pemilu, sehingga menjadi suatu indikasi yang kongkrit bagi para pemilih bahwa pemilih harus lebih selektif dalam memilih partai politik karena partai politik merupakan sasaran bagi masyarakat untuk mendapatkan haknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun, banyaknya jumlah partai politik memang di satu sisi merupakan aset politik yang sangat berharga bagi suatu bangsa. Idealnya semakin banyak partai politik akan semakin mengakomodasi suara rakyat yang sangat beragam. Tentu saja ini semua dengan catatan apabila partai politik memiliki fungsi, karena fungsi utama partai politik ialah mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu dan fungsi tersebut dilaksanakan dengan efektif dan profesional oleh pihak partai politik. Berikut ini dikemukakan sejumlah fungsi partai politik, yaitu :<sup>1</sup>

1. Sebagai sosialisasi politik, yaitu proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah

---

<sup>1</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta :1992, Grasindo), hal, 116-121

para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat.

2. Sebagai rekrutmen politik, yaitu seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya.
3. Sebagai partisipasi politik, yaitu kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan ikut dalam menentukan pemimpin pemerintah.
4. Sebagai pemandu kepentingan, yaitu dalam masyarakat terdapat sejumlah kepentingan yang berbeda bahkan acapkali bertentangan, seperti antara kehendak mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dan kehendak untuk mendapatkan barang dan jasa dengan harga murah tetapi bermutu. Untuk menampung dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan maka partai politik dibentuk. Kegiatan menampung, menganalisis dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan menjadi berbagai alternatif kebijakan umum, kemudian diperjuangkan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Itulah yang dimaksud dengan fungsi pemandu kepentingan.

5. Sebagai komunikasi politik, yaitu proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah.
6. Sebagai pengendali konflik, yaitu partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan ke dalam musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik.
7. Sebagai kontrol politik, yaitu partai politik memiliki kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah.

Dari ke tujuh fungsi partai politik diatas jika konsisten dijalankan oleh setiap partai politik, maka akan membuat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik semakin baik. Hal yang demikian juga akan semakin meningkatkan angka golput dalam pemilu, tidak terkecuali dalam pemilu legislatif 2009 yang diwarnai dengan banyaknya partai politik yang maju dalam pemilu tersebut.

Partai politik berkembang bersamaan dengan berkembangnya proses demokrasi yang merupakan sarana dalam pemilihan umum. Partai politik

muncul sebagai kendaraan politik dalam pemilihan umum untuk mendapatkan dukungan bagi seorang kandidat dari warga Negara, oleh karena itu pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diekspresikan melalui pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil oleh rakyat terhadap wakil-wakilnya yang akan duduk dilembaga perwakilan rakyat baik ditingkat pusat maupun di daerah. Pemilihan umum juga merupakan salah satu indikator terselenggaranya sebuah pemerintahan dan kehidupan bernegara yang mengklaim sebuah pemerintahan negara yang demokratis. Pemilu sekaligus dipakai oleh pemilih sebagai sarana untuk melakukan penilaian terhadap calon-calon wakil rakyat yang mencalonkan diri untuk duduk dalam lembaga perwakilan rakyat. Disinilah peran penting kedaulatan rakyat, karena komponen paling utama dalam penyelenggaraan pemilu adalah terkait dengan pemilih, maka peserta pemilu baik melalui partai politik maupun perorangan berlomba-lomba untuk mengambil simpati para pemilih dalam pemilihan umum.

Peran pemilih adalah sangat penting dalam pemilihan umum, karena pemilih merupakan tujuan semua pihak untuk dipengaruhi dan diyakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan.<sup>2</sup> Pemilih dalam hal ini dapat berbentuk konstituen maupun masyarakat pada umumnya. Konstituen umumnya merupakan masyarakat yang merasa

---

<sup>2</sup> Firmanzah, *Marketing Politik*, Jakarta : yayasan obor Indonesia, 2007, Hal 102

diwakili oleh suatu panduan hidup bernegara yang tertuang dalam institusi politik seperti partai dan seorang pemimpin.<sup>3</sup>

Seiring dengan berkembangnya pemilu di Indonesia, tingkat kesadaran politik masyarakat juga ikut berkembang. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut, salah satunya adalah persepsi masyarakat terhadap partai yang memiliki pengaruh terhadap pilihan politik. Hal ini dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih sebagai berikut:

a. Sosiologis

Sosiologis merupakan istilah yang disebut dengan Mazhab Columbia (*The Columbia School of Electoral Behavior*) merupakan pendekatan yang menekankan pada peranan faktor-faktor sosiologis dalam membentuk perilaku politik seseorang. Seseorang tidak ikut dalam pemilihan dijelaskan sebagai akibat dari latar belakang sosiologis tertentu, seperti agama, pendidikan, pekerjaan, ras dan sebagainya. Faktor jenis pekerjaan juga dinilai bisa mempengaruhi keputusan orang ikut pemilihan atau tidak.<sup>4</sup>

b. Psikologis

Psikologis merupakan istilah yang disebut dengan Mazhab Michigan (*The Michigan Survey Research Center*) lebih menekankan pada pengaruh

---

<sup>3</sup> Ibid.,hal 105.

<sup>4</sup> Muhammad Asfar, *Beberapa Pendekatan Dalam Memahami Prilaku Pemilih*, Jurnal Ilmu Politik Edisi No. 16, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hal. 52

faktor psikologis seseorang dalam menentukan perilaku politik. Menurut Greenstein ada 3 fungsi sikap yang mempengaruhi perilaku pemilih yaitu: *Pertama*, sikap merupakan fungsi kepentingan. Artinya, penilaian terhadap suatu obyek diberikan berdasarkan motivasi, minat dan kepentingan orang tersebut. *Kedua*, sikap merupakan fungsi penyesuaian diri. Artinya, seseorang bersikap tertentu sesuai dengan keinginan orang itu untuk sama atau tidak sama dengan tokoh atau kelompok yang dikaguminya. *Ketiga*, sikap merupakan fungsi eksternalisasi dan pertahanan diri. Artinya, sikap seseorang itu merupakan upaya untuk mengatasi konflik batin atau tekanan psikis, yang mungkin berwujud mekanisme pertahanan (*defense mechanism*). Pembentukan sikap tidaklah bersifat begitu saja terjadi, melainkan proses sosialisasi yang berkembang menjadi ikatan psikologis yang kuat antara seseorang dengan partai politik atau kandidat tertentu. Kedekatan inilah yang menentukan seseorang ikut memilih atau tidak. Makin dekat seseorang dengan partai atau kandidat tertentu makin besar kemungkinan seseorang terlibat dalam pemilihan.<sup>5</sup>

c. Rasional

Dua faktor diatas menempatkan pemilih pada waktu dan ruang kosong baik secara implisit maupun eksplisit. Mereka beranggapan bahwa memilih bukanlah keputusan yang dibuat pada saat menjelang atau ketika ada di bilik suara, tetapi sudah ditentukan jauh sebelumnya, bahkan jauh sebelum kampanye dimulai. Karakteristik sosiologis, latar belakang

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hal .52

keluarga, pembelahan kultural atau identifikasi partai melalui proses sosialisasi dan pengalaman hidup, merupakan variabel yang secara sendiri-sendiri maupun komplementer mempengaruhi perilaku atau pilihan politik seseorang. Tetapi pada kenyataannya, ada sebagian pemilih yang mengubah pilihan politiknya dari satu pemilu ke pemilu lainnya. Ini disebabkan oleh ketergantungan. Pada peristiwa-peristiwa politik tertentu yang bisa saja mengubah preferensi pilihan politik seseorang. Hal ini berarti ada variabel-variabel lain yang ikut menentukan dalam mempengaruhi perilaku politik seseorang. Ada faktor-faktor situasional yang ikut berperan dalam mempengaruhi pilihan politik seseorang dalam pemilu. Dengan begitu, pemilih bukan hanya pasif melainkan juga individu yang aktif. Ia tidak terbelenggu oleh karakteristik sosiologis, melainkan bebas bertindak. Faktor-faktor situasional, bisa berupa isu-isu politik atau kandidat yang dicalonkan, seperti ketidakpercayaan dengan pemilihan yang bisa membawa perubahan lebih baik. Atau ketidakpercayaan masalah akan bisa diselesaikan jika pemimpin baru terpilih, dan sebagainya. Pemilih yang tidak percaya dengan pemilihan akan menciptakan keadaan lebih baik, cenderung untuk tidak ikut memilih.

Faktor pemilih rasional juga merupakan kegiatan memilih sebagai kalkulasi untung dan rugi yang di pertimbangkan tidak hanya ongkos memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang di harapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif berupa pilihan yang ada. Pertimbangan ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk

terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah. Bagi pemilih, pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk membuat keputusan tentang partai atau kandidat yang dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih.<sup>6</sup>

Beberapa pendekatan diatas sama-sama berasumsi bahwa memilih merupakan kegiatan yang otonom, dalam arti tanpa desakan dan paksaan dari pihak lain. Namun, dalam kenyataan di Negara-negara berkembang perilaku memilih bukan hanya ditentukan oleh pemilih sebagaimana disebutkan oleh beberapa pendekatan diatas, tetapi dalam banyak hal justru ditentukan oleh tekanan kelompok, intimidasi, dan paksaan dari kelompok atau pemimpin tertentu.

Dalam fenomena banyaknya partai juga terjadi dalam pemilu legislatif di kecamatan Bancar kabupaten Tuban. Berikut adalah daftar partai dan perolehan suara yang ikut dalam pemilu legislatif 2009 di kecamatan Bancar kabupaten Tuban:

**Table 1.1**  
**Daftar Partai Dan Perolehan Suara**  
**Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009 Di Kecamatan Bancar**  
**Kabupaten Tuban**

No	Nama Partai	Perolehan Suara	Jumlah kursi dalam DPR
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	712	1
2.	Partai Karya Peduli Bangsa	511	-
3.	Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia	132	-

<sup>6</sup> Surbakti ramlan. *Memahami ilmu politik*. Gramedia widiasarana Indonesia. Jakarta Hal 146

4.	Partai Peduli Rakyat Nasional	81	-
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya	586	4
6.	Partai Barisan Nasional	179	1
7.	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	-	-
8.	Partai Keadilan Sejahtera	1248	3
9.	Partai Amanat Nasional	1608	3
10.	Partai Perjuangan Indonesia Baru	239	-
11.	Partai Kedaulatan	-	-
12.	Partai Persatuan Daerah	63	-
13.	Partai Kebangkitan Bangsa	2448	7
14.	Partai Pemuda Indonesia	72	-
15.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	28	-
16.	Partai Demokrasi Pembaruan	114	-
17.	Partai Karya Perjuangan	-	-
18.	Partai Matahari Bangsa	31	-
19.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	-	-
20.	Partai Demokrasi Kebangsaan	19	-
21.	Partai Republika Nusantara	27	-
22.	Partai Pelopor	36	-
23.	Partai Golongan Karya	8509	13
24.	Partai Persatuan Pembangunan	481	4
25.	Partai Damai Sejahtera	36	-
26.	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	30	-
27.	Partai Bulan Bintang	81	1
28.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3704	6
29.	Partai Bintang Reformasi	62	-
30.	Partai Patriot	1802	-
31.	Partai Demokrat	2740	5
32.	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	-	-
33.	Partai Indonesia Sejahtera	20	-
34.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	777	5
35.	Partai Merdeka	-	-
36.	Partai Persatuan Nahdatul Ulama	-	-
37.	Partai Sarikat Indonesia	-	-
38.	Partai Buruh	-	-
<b>Jumlah Perolehan Suara</b>		<b>26376</b>	<b>50</b>

Sumber: Salinan Copy KPU Kabupaten Tuban, 2012

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jumlah partai yang menjadi kontestan dalam pemilu legislatif 2009 di kecamatan Bancar berjumlah 38 partai politik dan yang memperoleh suara terbanyak adalah Partai Golongan

Karya dengan memperoleh 8509 suara. Begitu pula dengan pemilu 2004 yang berjumlah 24 partai, bahwa di kecamatan Bancar perolehan suara terbanyak adalah partai Golkar, dengan rincian sebagai berikut :

**Table 1.2**  
**Daftar Partai Dan Perolehan Suara**  
**Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2004 Di Kecamatan Bancar**  
**Kabupaten Tuban**

<b>No</b>	<b>Nama Partai</b>	<b>Perolehan Suara</b>	<b>Jumlah kursi dalam DPR</b>
1	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	172	1
2	Partai Buruh Sosial Demokrat	67	-
3	Partai Bulan Bintang	311	2
4	Partai Merdeka	60	-
5	Partai Persatuan Pembangunan	1935	4
6	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	43	-
7	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	0	-
8	Partai Nasional Benteng Kemerdekaan	151	-
9	Partai Demokrat	963	3
10	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	238	-
11	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	207	1
12	Partai Persatuan Nahdatul Ulama Indonesia	69	-
13	Partai Amanat Nasional	1273	3
14	Partai Karya Peduli Bangsa	414	1
15	Partai Kebangkitan Bangsa	7156	9
16	Partai Keadilan Sejahtera	502	1
17	Partai Bintang Reformasi	169	-
18	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8244	10
19	Partai Damai Sejahtera	88	-
20	Partai Golongan Karya	9085	16
21	Partai Patriot Pancasila	77	-
22	Partai Sarikat Indonesia	84	1
23	Partai Persatuan Daerah	0	-
24	Partai Pelopor	42	-
<b>Jumlah Perolehan Suara</b>		<b>31350</b>	<b>52</b>

Sumber: Salinan Copy KPU Kabupaten Tuban, 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Pemilu 2009 dengan pemilu 2004 di kecamatan bancar merupakan pemilu yang sama-sama di menangkan oleh partai Golkar dan di dua periode itu pula partai Golkar dapat meraih kursi yang paling banyak jika dibandingkan dari partai-partai yang lain. Di tahun 2009 partai Golkar mendapatkan 16 kursi, sedangkan tahun 2004 jumlah kursi DPR mendapatkan 13 kursi. Hal ini terbukti bahwa partai golkar menjelang pemilihan umum sering bersosialisasi dengan masyarakat di kecamatan Bancar.<sup>7</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas pengaruh persepsi masyarakat pada partai politik terhadap perilaku pemilih dalam pemilu legislatif 2009 di kecamatan Bancar kabupaten Tuban. Penelitian ini menarik dilakukan karena:

1. Pemilu legislatif Tahun 2009 diikuti oleh 38 partai. banyaknya partai menjadi kesempatan bagus bagi masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih partai, karena partai merupakan salah satu sarana untuk memperoleh hak-hak sebagai warga Negara.
2. Banyak partai juga akan merupakan suatu kesempatan bagi masyarakat untuk lebih menambah pengetahuan tentang partai politik, yang nantinya akan memengaruhi persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat tentang partai akan mempengaruhi perilaku memilihnya termasuk dalam pemilu legislatif, di kecamatan bancar kabupaten tuban ini.

---

<sup>7</sup> Wawancara Responden pendukung partai golkar “Baidlowi”, 2012

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana persepsi masyarakat pada partai politik di kecamatan Bancar kabupaten Tuban?
2. Bagaimana perilaku pemilih masyarakat dalam pemilu legislatif 2009 di kecamatan Bancar kabupaten Tuban?
3. Adakah pengaruh persepsi masyarakat pada partai politik terhadap perilaku pemilihnya dalam pemilu legislatif 2009 di kecamatan Bancar kabupaten Tuban?

**C. Batasan Masalah**

Untuk memperjelas serta mempertegas batasan ruang lingkup penelitian dengan tujuan untuk menghasilkan uraian yang sistematis maka diperlukan adanya batasan masalah. Adapun batasan-batasan masalah dalam penelitian ini hanya meneliti persepsi masyarakat di kecamatan Bancar pada partai politik dalam pemilu legislatif 2009. Yang dimaksud masyarakat masyarakat disini adalah masyarakat yang mendapatkan hak pilih dan terdaftar di DPT, serta berdomisili di kecamatan Bancar pada saat pemilu legislatif 2009.

**D. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas, maka diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan tentang persepsi masyarakat pada partai politik di kecamatan Bancar kabupaten Tuban?
2. Mendeskripsikan tentang perilaku pemilih dalam pemilu legislatif 2009 di kecamatan Bancar kabupaten Tuban?
3. Menganalisis tentang ada tidaknya pengaruh persepsi masyarakat pada partai politik terhadap perilaku pemilih dalam pemilu legislatif 2009 di kecamatan Bancar kabupaten Tuban?

#### **E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian**

Layaknya sebuah penelitian ilmiah tentunya diharapkan memiliki manfaat baik bagi penulis bahkan bagi orang yang membaca laporan penelitian ini. Adapun manfaat dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dibidang politik tentang berpengaruh tidaknya persepsi masyarakat pada partai politik terhadap perilaku pemilih dalam pemilu legislatif 2009 di kecamatan Bancar.
2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu bahan koreksi dan referensi dalam bidang ilmu politik serta bisa dijadikan studi banding pada pemilu Indonesia mendatang.

## F. Variabel Penelitian

1. Variabel penelitian adalah suatu yang merupakan inti dari problema penelitian.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel X adalah persepsi masyarakat pada partai politik dan variabel Y adalah perilaku pemilih dalam pemilu legislatif 2009 di kecamatan Bancar kabupaten Tuban. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y di Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban.

### 2. Indikator Variabel

Indikator dari variabel pada penelitian dengan judul “Persepsi masyarakat pada partai politik terhadap perilaku pemilih dalam pemilu legislatif 2009 di Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut.

Variabel-variabel di atas menjadi sub-sub variabel atau indikator seperti tabel dibawah ini.

<b>INDIKATOR VARIABEL X (Persepsi masyarakat pada partai politik)</b>	<b>INDIKATOR VARIABEL Y (Perilaku pemilih dalam pemilu legislatif 2009 di kecamatan Bancar kabupaten Tuban)</b>
Indikator Variabel: 1. Pengetahuan masyarakat tentang partai politik 2. Pengetahuan masyarakat	Indikator Variabel: 1. Karakteristik pemilih berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat

<sup>8</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : 2006, Rineka Cipta), Hal. 96

<p>tentang fungsi partai politik, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sebagai sosialisasi politik</li> <li>b. Sebagai rekrutmen politik</li> <li>c. Sebagai partisipasi politik</li> <li>d. Sebagai pemandu kepentingan</li> <li>e. Sebagai komunikasi politik</li> <li>f. Sebagai pengendali konflik</li> <li>g. Sebagai kontrol politik</li> </ol>	<p>pendidikan, dan pekerjaan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih yang meliputi faktor sosiologis, faktor psikologis dan faktor rasional</li> <li>3. Tipologi perilaku Pemilih (kritis, tradisional, rasional, skeptis)</li> <li>4. Teori pilihan rasional</li> </ol>
---	--

Asumsi dari adanya hubungan antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) Bahwa pada dasarnya adalah partai politik membutuhkan suara pemilih dalam pemilu umum sedangkan pemilih (masyarakat) juga penting bagi keberlangsungan dan survival partai politik sebagai organisasi sosial. Serta dari adanya hubungan antara dua variabel diatas dikemukakan oleh Muhammad Asfar, yaitu ada beberapa pendekatan dalam memahami perilaku memilih salah satunya pendekatan sosiologis. Pendekatan ini pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku memilih Karakteristik sosial (seperti pekerjaan, pendidikan, dan sebagainya) dan karakteristik atau latar belakang sosiologis (seperti agama, wilayah, jenis kelamin, umur dan sebagainya) merupakan faktor penting dalam menentukan pilihan politik. Pendek kata, pengelompokan sosial seperti umur (tua-muda), jenis kelamin (laki-perempuan), agama dan sebagainya

dianggap mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam membentuk pengelompokan sosial baik secara formal maupun informal.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti akan mengaitkan persepsi masyarakat pada partai politik terhadap perilaku pemilih dalam pemilu legislatif 2009 di kecamatan Bancar kabupaten Tuban.

### **G. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam menginterpretasikan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka akan dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Persepsi masyarakat pada partai politik**

Seorang pakar organisasi bernama Robbins mengungkapkan bahwa persepsi dapat didefinisikan sebagai proses dengan mana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka.<sup>10</sup> Sejalan dari defenisi tadi, seorang ahli yang bernama Thoha, mengungkapkan bahwa persepsi pada hakekatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang didalam memahami informasi tentang lingkungannya baik lewat penglihatan maupun pendengaran.<sup>11</sup> Maka dari beberapa defenisi diatas secara umum dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah proses masuknya informasi dari suatu lingkungan yang diterima melalui alat indera dan

---

<sup>9</sup> Muhammad Asfar, "*Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004*", (Surabaya: Pustaka Eureka, 2006) hal.138

<sup>10</sup> Robbins, P Stephen, Handyana Pujaatmaka (Penterjemah). *Perilaku Organisasi, Konsep, Kontroversi, Aplikasi* (Jakarta :Prenhallindo, 2001). Hal 88

<sup>11</sup> Miftah Thoha, *Perilaku Organisasi: Konsep dan Aplikasinya Cetakan Sembilan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998). Hal 23

kemudian informasi tersebut diolah di dalam otak , agar dapat memberikan makna pada lingkungan tersebut melalui pengalaman dan pengetahuan yang sudah dimiliki.

Sedangkan definisi masyarakat menurut Selo Sumarjan adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan.<sup>12</sup> Sedangkan menurut Hasan Shadily dalam bukunya “Sosiologi untuk masyarakat Indonesia” menyatakan bahwa : masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh mempengaruhi satu sama lain.<sup>13</sup>

Dari pengertian-pengertian tentang masyarakat diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang saling berinteraksi, yang memiliki prasarana untuk kegiatan tersebut dan adanya keterikatan untuk mencapai tujuan bersama.

Adapun yang dimaksud dengan partai politik menurut Carl J Friedrich adalah ”sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil. (*A political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing maintaining for its leaders the*

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 25-26

<sup>13</sup> Hasan Shadily, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia* (Jakarta : Bina Aksara, 1983), hal. 47

*control of government, with the further objective of giving to members of the party, through such control ideal and material benefits and advantages).*<sup>14</sup>

Adapun yang dimaksud dengan persepsi masyarakat pada partai politik dalam penelitian ini adalah Pemahaman masyarakat terhadap kelompok yang merebut kekuasaan sebagai pemimpin negara yang memberikan manfaat bersifat idiiil maupun materiil

## 2. Perilaku Pemilih

Aktivitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih atau tidak memilih (*to vote or not to vote*) di dalam suatu pemilihan umum. Bila voters memutuskan untuk memilih (*to vote*) maka voters akan memilih atau mendukung kandidat tertentu.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka yang dimaksud dengan persepsi masyarakat pada partai politik terhadap perilaku pemilih dalam pemilu legislatif 2009 di kecamatan Bancar kabupaten Tuban. Adalah tanggapan masyarakat terhadap partai politik dan berpartisipasi dalam pemilu untuk memilih kandidat yang sesuai dengan keinginannya.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hal 161

<sup>15</sup> Arbi Sanit, *Partai, Pemilu dan Demokrasi*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997) Hal.

## H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dari penelitian ini, penulis membagi menjadi beberapa kelompok, yaitu:

BAB I : Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan masalah, manfaat dan kegunaan penelitian, variabel penelitian, definisi operasional, sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan teori yang berisi tentang konsep persepsi masyarakat pada partai politik, tipologi perilaku pemilih, teori pilihan rasional dan hipotesis.

BAB III : Metode penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis data, sumber data, metode pengumpulan data, serta analisis data yang di analisis dengan menggunakan rumus *slovin*.

BAB IV : Hasil Penelitian yang berisi tentang deskripsi data, analisis data, dan pengujian hipotesis.

BAB V : Pembahasan dan Diskusi Hasil Penelitian yang berisi tentang diskusi tentang konsep persepsi masyarakat pada partai politik, diskusi tentang perilaku pemilih dalam pemilu legislatif 2009 di kecamatan Bancar, dan Diskusi tentang pengaruh persepsi masyarakat pada partai politik terhadap perilaku pemilih dalam pemilu legislatif 2009 di kecamatan Bancar.

BAB VI : Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.